



SUMBER BERITA

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERISAAN PERHATIAN KHUSUS

Volume Pekerjaan Kurang 40 Persen

**Tersangka DD Nangai
Berpeluang Berjamaah**

PELABAI - Pengusutan dugaan korupsi pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Desa Nangai Amen tahun 2018 senilai Rp 608 juta oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Lebong, mulai kemarin (2/9) naik ke penyidikan. Artinya kasus ini bakal berbuah tersangka yang berujung ke persidangan di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Lebong, Endang Sudarna, SH, MH melalui Kasi Pidana Khusus (Pidsus), Eddy Sugandi Tahir, SH mengatakan,

pihaknya sudah menemukan indikasi pengurangan volume hingga 40 persen di balik pembangunan JUT Desa Nangai Amen yang bersumber dari Dana Desa (DD) 2018 itu. "Yang jelas untuk kerugiannya, kami akan meminta bantuan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, red) Bengkulu melakukan audit," kata Sugandi.

Minggu ini, tim penyidik Seksi Pidsus kembali memeriksa sejumlah saksi. Antara lain DC (38) selaku kepala desa. Termasuk perangkat desa lainnya, yakni anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nangai Amen. Tidak hanya bertujuan menggali lebih dalam bentuk penyimpangannya, pemeriksaan

lanjutan itu bertujuan menentukan tersangka. "Setelah ada audit kerugian dari BPKP, segera kami tetapkan tersangkanya," papar Sugandi.

Namun Sugandi masih enggan berandai-andai soal tersangka. Terkait jumlahnya, bisa saja berjamaah. Kepastiannya tergantung hasil penyidikan. Tidak hanya dari kalangan perangkat desa, pihak lain yang berkaitan dengan urusan DD juga bisa terseret. Baik PNS di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Sosial (PMDS) selaku pihak yang mengeluarkan rekomendasi pencairan DD maupun PNS di Badan Keuangan Daerah (BKD) yang mencairkan dananya. "Ya kita lihatlah

nanti," pungkas Sugandi.

Dilansir sebelumnya, kasus ini berawal dari laporan warga Desa Nangai Amen ke Kejari Lebong. **Intinya**, warga menilai dana pengerjaan pembangunan jalan desa banyak disunat. Soalnya hingga akhir tahun pembangunan jalan tak kunjung selesai. Bahkan dana penyertaan modal yang dianggarkan dalam APBDes senilai Rp 80 juta tidak diserahkan Deri kepada pengurus BUMDes. Dampaknya tidak hanya berpotensi memenjarakan perangkat desa, namun berujung tidak cairnya DD dan ADD Nangai Amen yang tahun ini seharusnya menerima dana **setidaknya** Rp 1,2 miliar. (sca)